



DIMENSI FILOSOFIS ILMU KOMUNIKASI: KAJIAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI, DAN ETIKA KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL

Nurrahman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

nurrahman3005254004@uinsu.ac.id

Elfi Yanti Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

elfiyantiritonga@uinsu.ac.id

Erwan Effendy

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

erwanefendi@uinsu.ac.id

Received: 04 Agustus 2026 Accepted: 02 September 2026 Published: 10 September 2026

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah hakikat komunikasi, proses pembentukan pengetahuan, orientasi nilai, dan standar etika dalam praktik komunikasi kontemporer. Namun, kajian ilmu komunikasi masih cenderung membahas dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika secara terpisah sehingga belum menghasilkan pemahaman filosofis yang integratif terhadap kompleksitas komunikasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengintegrasikan keempat dimensi tersebut sebagai fondasi filosofis ilmu komunikasi di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Data bersumber dari buku teori dan filsafat komunikasi, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan publikasi akademik relevan yang dikaji melalui dokumentasi, klasifikasi tematik, reduksi data, penyajian data, dan sintesis interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis komunikasi telah bergeser dari proses transmisi linear menuju konstruksi makna yang dinamis, relasional, dan multidimensional. Secara epistemologis, ilmu komunikasi bersifat multiparadigma melalui pendekatan positivistik, interpretatif, dan kritis. Secara aksiologis, komunikasi berorientasi pada kebenaran, keadilan, kebermanfaatan, dan tanggung jawab sosial, tetapi menghadapi tekanan kepentingan ekonomi, politik, dan algoritmik. Secara etis, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan pelanggaran privasi menegaskan kebutuhan akan integrasi fondasi filosofis untuk membangun ilmu dan praktik komunikasi yang kritis, etis, serta bertanggung jawab.

Kata Kunci: Ilmu Komunikasi, Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Etika Komunikasi, Komunikasi Digital



Abstract

Digital transformation has reshaped the nature of communication, the production of knowledge, value orientations, and ethical standards in contemporary communication practices. However, communication studies still tend to examine ontology, epistemology, axiology, and ethics separately, resulting in an insufficiently integrated philosophical understanding of the complexities of digital communication. This study aims to analyze and integrate these four dimensions as the philosophical foundations of communication science in the digital era. The study employs a qualitative approach using library research. Data were derived from books on communication theory and philosophy, scholarly journal articles, conference proceedings, and other relevant academic publications and were examined through documentation, thematic classification, data reduction, data display, and interpretive synthesis. The findings indicate that, ontologically, communication has shifted from a linear transmission process toward a dynamic, relational, and multidimensional construction of meaning. Epistemologically, communication science is multiparadigmatic, encompassing positivist, interpretive, and critical approaches. Axiologically, communication is oriented toward truth, justice, social benefit, and responsibility but is increasingly challenged by economic, political, and algorithmic interests. Ethically, disinformation, hate speech, information manipulation, and privacy violations demonstrate the need to integrate philosophical foundations in developing critical, ethical, and socially responsible communication science and practices.

Keywords: Communication Science, Ontology, Epistemology, Axiology, Communication Ethics, Digital Communication

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara manusia membangun realitas, memproduksi pengetahuan, mendistribusikan pesan, dan menilai kebenaran dalam kehidupan sosial. Media sosial, algoritma, jaringan digital, dan platform komunikasi tidak lagi berfungsi sebagai saluran netral, tetapi ikut membentuk apa yang terlihat, dianggap penting, dipercaya, dan diperdebatkan oleh publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut memunculkan persoalan krusial berupa disinformasi, polarisasi opini, krisis kepercayaan terhadap media, kaburnya batas fakta dan opini, serta degradasi etika komunikasi (Moreno Esparza, 2015). Dalam perspektif ontologis, realitas komunikasi menjadi semakin plural dan terkonstruksi, secara epistemologis, validitas pengetahuan semakin sulit ditetapkan, secara aksiologis, kepentingan ekonomi, politik, dan popularitas dapat menggeser orientasi kebenaran sedangkan secara etis, kebebasan digital menghadirkan persoalan akuntabilitas. Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa platform memiliki nilai pada tingkat personal, kultural, dan infrastruktural sehingga tidak tepat dipahami sebagai medium yang sepenuhnya netral (Hallinan et al., 2022a). Karena itu, isu ini penting secara akademik untuk memperkuat fondasi filsafat ilmu komunikasi dan secara praktis untuk membangun praktik komunikasi digital yang kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Literatur terdahulu telah merespons persoalan tersebut melalui beberapa jalur, tetapi cenderung terfragmentasi. Kajian ontologi komunikasi menekankan komunikasi sebagai



proses konstruksi makna dan realitas sosial, bukan sekadar transmisi pesan (Nyre, 2018). Kajian epistemologi menempatkan ilmu komunikasi sebagai disiplin multiparadigma yang memanfaatkan pendekatan positivistik, interpretatif, dan kritis untuk memahami fenomena yang berbeda (Littlejohn & Foss, 2021). Sementara itu, penelitian kritis menyoroti relasi kekuasaan, ideologi, komodifikasi, dan dominasi platform dalam pembentukan komunikasi digital (Fuchs, 2021), sedangkan kajian etika menekankan dampak disinformasi terhadap kualitas ruang publik (Bennett & Livingston, 2018). Studi yang lebih baru memperlihatkan bahwa algoritma dan *filter bubbles* juga memengaruhi cara pengetahuan, kebenaran, dan narasi publik dibentuk dalam jurnalisme digital (Serafini, 2023a), sementara literasi berita masih memerlukan penguatan teoritis agar dapat menjelaskan proses verifikasi dan identifikasi misinformasi (Vraga et al., 2021a). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengintegrasikan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika dalam satu kerangka analitis yang secara khusus menjelaskan kompleksitas komunikasi digital (Adisti Istivari Wahyudi, 2024). Kekurangan integrasi inilah yang menjadi *research gap* utama penelitian ini.

Merespons kekurangan tersebut, penelitian ini bertujuan membangun pembacaan filosofis yang integratif terhadap ilmu komunikasi dengan menempatkan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika sebagai empat dimensi yang saling berhubungan, bukan sebagai bidang pembahasan yang berdiri sendiri (Unwakoly, 2022). Secara khusus, penelitian ini menjawab empat masalah. Pertama, bagaimana hakikat dan realitas komunikasi berubah ketika interaksi manusia semakin dimediasi oleh jaringan, platform, algoritma, dan ruang virtual. Kedua, bagaimana pengetahuan komunikasi diperoleh dan divalidasi ketika arus informasi digital menghadirkan *post-truth*, disinformasi, serta pluralitas paradigma penelitian. Ketiga, nilai, tujuan, dan kepentingan apa yang semestinya mengarahkan penggunaan ilmu komunikasi di tengah tekanan ekonomi, politik, dan popularitas. Keempat, bagaimana prinsip etika dapat mempertahankan kejujuran, keadilan, penghormatan, dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi digital. Persoalan-persoalan tersebut telah muncul secara parsial dalam tulisan ini, sebagai kebutuhan untuk mengintegrasikan dimensi filosofis ilmu komunikasi (Alamin & Sopian, 2024). Untuk menjawabnya, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian kepustakaan dengan menyintesis pemikiran klasik dan kontemporer mengenai teori komunikasi dan filsafat ilmu. Orientasi tersebut diarahkan pada pembentukan kerangka konseptual yang kritis, reflektif, normatif, dan relevan dengan komunikasi digital.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa krisis komunikasi digital tidak dapat dijelaskan atau diatasi melalui satu dimensi filosofis secara terpisah. Ketika realitas komunikasi dikonstruksi oleh interaksi manusia, teknologi, algoritma, dan struktur kekuasaan, ontologi menentukan apa yang dipahami sebagai realitas komunikasi,



epistemologi menentukan bagaimana klaim pengetahuan dan kebenaran divalidasi, aksiologi menentukan untuk kepentingan siapa komunikasi digunakan, sedangkan etika menentukan batas moral produksi, distribusi, dan penggunaan pesan. Dengan demikian, perubahan ontologis tanpa ketelitian epistemologis dapat meningkatkan kerentanan terhadap disinformasi, kemampuan epistemologis tanpa orientasi aksiologis dapat menghasilkan komunikasi yang benar secara teknis tetapi digunakan secara manipulatif, sementara nilai tanpa etika operasional dapat kehilangan daya regulatif dalam praktik. penelitian ini menempatkan integrasi dimensi filosofis tersebut sebagai jalan untuk memperkuat komunikasi yang berlandaskan kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Boyne & Habermas, 1986). Studi mengenai nilai platform menunjukkan bahwa nilai juga tertanam pada pengguna, budaya, kebijakan, dan infrastruktur digital (Hallinan et al., 2022), sedangkan Serafini (2023) menunjukkan relevansi algoritma dan *filter bubbles* terhadap pembentukan struktur pengetahuan digital. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, argumen tersebut dirumuskan sebagai proposisi konseptual semakin terintegrasi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika, semakin memadai kerangka ilmu komunikasi dalam memahami serta merespons kompleksitas komunikasi digital.

LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai filsafat ilmu komunikasi memperlihatkan bahwa respons terhadap transformasi digital berkembang ke dalam sedikitnya tiga kecenderungan utama yang saling beririsan. Pertama, kajian ontologis menelaah perubahan hakikat komunikasi dari proses transmisi pesan menuju proses konstruksi realitas, makna, dan relasi yang semakin dimediasi oleh jaringan, platform, algoritma, serta lingkungan digital (Moreno Esparza, 2015). Kedua, kajian epistemologis berfokus pada pluralitas paradigma positivistik, interpretatif, dan kritis serta persoalan baru mengenai validitas pengetahuan ketika kebenaran berhadapan dengan disinformasi, *post-truth*, *filter bubbles*, dan fragmentasi audiens (Bennett & Livingston, 2018). Ketiga, kajian aksiologis-etis mempersoalkan nilai, tujuan, tanggung jawab sosial, kebebasan berekspresi, dan relasi kekuasaan yang membentuk praktik komunikasi digital (Boyne & Habermas, 1986). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga rumpun tersebut telah berkembang relatif kuat, tetapi masih sering diperlakukan secara terpisah. Kajian mutakhir juga menegaskan bahwa nilai tertanam pada praktik pengguna, budaya platform, dan infrastruktur digital sehingga aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis sesungguhnya tidak dapat dipisahkan secara tegas (Hallinan et al., 2022).

Kecenderungan pertama dapat disebut sebagai pola ontologis-konstruktivis, yaitu penelitian yang menempatkan komunikasi sebagai proses pembentukan realitas sosial, bukan sekadar perpindahan informasi dari komunikator kepada komunikan. Orientasi ini



bergerak dari model linear menuju pendekatan relasional, simbolik, jaringan, dan *mediated construction*. Dalam penelitian ini, perubahan tersebut terlihat pada argumentasi bahwa komunikasi digital menghasilkan realitas yang plural, hibrid, dan multidimensional karena dibentuk melalui interaksi antara manusia, teknologi, algoritma, struktur platform, serta relasi kekuasaan (Moreno Esparza, 2015). Secara metodologis, tipe penelitian ini banyak menggunakan analisis konseptual, teori media, studi platform, analisis kritis, dan pendekatan konstruktivis untuk menjelaskan bagaimana realitas diproduksi dan dimediasi. Hallinan et al (2022) memperluas kecenderungan tersebut dengan menunjukkan bahwa platform bukan medium netral, melainkan ruang tempat nilai diekspresikan, diperdebatkan, dan disebarakan pada tingkat pengguna hingga infrastruktur. Kekuatan pola ini adalah kemampuannya menjelaskan bahwa teknologi ikut membentuk realitas komunikasi; keterbatasannya, dimensi kebenaran, tujuan moral, dan tanggung jawab etis sering belum dianalisis sebagai satu rangkaian filosofis yang terpadu.

Kecenderungan kedua berorientasi pada epistemologi komunikasi dan memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana pengetahuan komunikasi diperoleh, divalidasi, dan dipertanggungjawabkan. Literatur klasik menempatkan ilmu komunikasi sebagai disiplin multiparadigma yang memanfaatkan pendekatan positivistik, interpretatif, dan kritis, masing-masing dengan asumsi berbeda mengenai realitas, kebenaran, metode, dan posisi peneliti (Littlejohn & Foss, 2021). Hal ini juga menunjukkan bahwa era digital memperluas persoalan epistemologis karena informasi tersedia secara melimpah, sementara kualitas dan validitasnya tidak selalu dapat diverifikasi dengan mudah. (Serafini, 2023), melalui kajian teoretis tentang jurnalisme digital, menunjukkan bahwa algoritma, jaringan homofil, dan *filter bubbles* turut membentuk struktur pengetahuan serta polarisasi dalam ruang daring. Sementara itu, Vraga et al (2021) menilai bahwa studi literasi berita masih membutuhkan penguatan konseptual dan menawarkan lima domain pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan verifikasi dan identifikasi misinformasi. Pola ini kuat dalam menjelaskan kriteria pengetahuan dan metode, tetapi sering berhenti pada persoalan validitas tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan nilai sosial dan tanggung jawab moral penggunaan pengetahuan komunikasi.

Kecenderungan ketiga berorientasi pada aksiologi dan etika komunikasi dengan menelaah untuk apa komunikasi digunakan, nilai apa yang seharusnya membimbingnya, serta konsekuensi moral yang muncul dari praktik komunikasi. Dalam penelitian, nilai kebenaran, keadilan, tanggung jawab, kebermanfaatan sosial, penghormatan terhadap orang lain, dan kebebasan yang bertanggung jawab ditempatkan sebagai fondasi aksiologis komunikasi (McQuail, 2005). Pada saat yang sama, komunikasi digital dipandang menghadapi tekanan komersialisasi, propaganda, manipulasi, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, serta dominasi logika algoritmik yang dapat menggeser orientasi nilai



(Bennett & Livingston, 2018). Hallinan et al (2022) menunjukkan bahwa platform mengandung dan mengomunikasikan nilai secara eksplisit maupun implisit sehingga persoalan nilai tidak hanya berada pada pengguna, tetapi juga pada desain dan infrastruktur platform. UNESCO (2024) menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak, serta pendekatan multistakeholder dalam tata kelola platform digital. Pola ini kuat secara normatif, tetapi belum selalu menjelaskan bagaimana nilai dan etika berakar pada asumsi ontologis serta mekanisme epistemologis tertentu.

Ketiga kecenderungan tersebut telah menghasilkan fondasi penting, tetapi secara bersama-sama masih “melupakan” persoalan integrasi filosofis. Kajian ontologi sering berhenti pada pertanyaan mengenai hakikat realitas komunikasi dan mediasi teknologi; kajian epistemologi berfokus pada produksi, validasi, serta verifikasi pengetahuan; sedangkan kajian aksiologi-etika menekankan nilai, tanggung jawab, dan konsekuensi sosial. Pemisahan tersebut menyebabkan hubungan di antara ketiganya kurang dijelaskan: bagaimana asumsi tentang realitas komunikasi memengaruhi cara kebenaran ditentukan, bagaimana konsepsi kebenaran memengaruhi nilai yang diprioritaskan, serta bagaimana nilai tersebut diterjemahkan menjadi standar etis dalam praktik digital. *Research gap* yang sudah diidentifikasi dalam penelitian adalah masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika dalam satu kerangka analisis komunikasi kontemporer. Literatur mutakhir justru memperkuat kebutuhan integrasi tersebut seperti platform membawa nilai pada tingkat infrastruktur (Hallinan et al., 2022b), algoritma ikut membentuk kondisi epistemik komunikasi (Serafini, 2023a), dan tata kelola digital menuntut transparansi serta akuntabilitas sebagai prinsip normatif (UNESCO, 2023a). Dengan demikian, novelty yang lebih defensibel bukan membahas empat dimensi secara terpisah, tetapi menjelaskan keterhubungan sistematis di antara keempatnya.

Berdasarkan kekurangan tersebut, penelitian ini mengusulkan arah baru berupa kerangka filosofis integratif untuk membaca komunikasi digital sebagai kesatuan ontologis, epistemologis, aksiologis, dan etis. Orientasinya tidak lagi sekadar menanyakan “apa komunikasi”, “bagaimana pengetahuan komunikasi diperoleh”, “untuk apa komunikasi digunakan”, atau “apa yang baik dan buruk dalam komunikasi” secara terpisah, melainkan menjelaskan hubungan berantai di antara keempat pertanyaan tersebut. Secara ontologis, komunikasi dipahami sebagai realitas relasional yang dibentuk manusia, teknologi, platform, dan kekuasaan; secara epistemologis, klaim komunikatif harus dinilai melalui prosedur validasi, verifikasi, refleksi paradigma, dan literasi informasi; secara aksiologis, penggunaan komunikasi diarahkan pada kebenaran, keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial; sedangkan secara etis, nilai tersebut diterjemahkan menjadi prinsip tindakan dalam produksi dan distribusi pesan. Kerangka ini merespons kebutuhan peneliti untuk memperkuat fondasi filosofis ilmu komunikasi di era digital. Secara konseptual, arah



penelitian dapat dirumuskan sebagai Ontology → Epistemology → Axiology → Ethics → Responsible Digital Communication, dengan proposisi bahwa integrasi keempat dimensi menghasilkan pemahaman komunikasi yang lebih kritis, koheren, dan bertanggung jawab dibandingkan pendekatan parsial.

METODE PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah artefak tekstual berupa karya ilmiah dan dokumen akademik yang membahas dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks transformasi digital. Fokus analisis tidak diarahkan pada individu, kelompok, organisasi, atau institusi sebagai informan empiris, melainkan pada konsep, proposisi, argumentasi, kerangka teori, dan temuan penelitian yang terkandung dalam buku, artikel jurnal, prosiding, serta publikasi akademik. Penetapan teks sebagai unit analisis sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan yang bertujuan memahami dan menginterpretasikan gagasan secara sistematis. Dalam tulisan, karya-karya Stephen W. Littlejohn, Denis McQuail, Jürgen Habermas, serta literatur kontemporer mengenai komunikasi digital digunakan untuk menelaah fondasi teoritis dan normatif ilmu komunikasi. Unit makna yang diperhatikan meliputi perubahan hakikat komunikasi, cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan, orientasi nilai dan manfaat komunikasi, serta prinsip moral dalam praktik komunikasi digital. Dengan demikian, penelitian memandang literatur bukan sekadar sumber kutipan, tetapi sebagai artefak pengetahuan yang dapat dibandingkan, dikategorikan, dan disintesis untuk membangun kerangka filosofis komunikasi yang integratif (Krippendorff, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada sintesis konseptual dan interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak bertujuan mengukur hubungan numerik atau menguji hipotesis statistik, melainkan memahami makna, asumsi dasar, perdebatan paradigmatis, dan keterhubungan konsep-konsep filosofis dalam ilmu komunikasi. Desain ini memungkinkan peneliti menelaah secara kritis bagaimana ontologi menjelaskan hakikat realitas komunikasi, epistemologi menjelaskan produksi dan validasi pengetahuan, aksiologi menjelaskan orientasi nilai dan manfaat, sedangkan etika menentukan batas moral praktik komunikasi. Penelitian ini juga menggunakan *systematic literature review* secara konseptual untuk mengelompokkan literatur berdasarkan tema, menemukan pola, persamaan, perbedaan, dan *research gap*. Namun, orientasi penelitian lebih tepat diposisikan sebagai kajian literatur kualitatif-integratif karena prosedur *systematic review* lengkap, seperti alur penyaringan dokumen dan jumlah artikel pada setiap tahap, belum dilaporkan. Snyder (2019) menegaskan bahwa *literature review* dapat menjadi metodologi penelitian apabila proses pencarian, seleksi, evaluasi, dan sintesis dilakukan



secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini karena itu diarahkan untuk menghasilkan pemahaman filosofis yang koheren, bukan generalisasi statistik.

Sumber data penelitian berupa data tekstual yang berasal dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya klasik dan kontemporer dalam teori komunikasi dan filsafat ilmu, termasuk pemikiran Stephen W. Littlejohn, Denis McQuail, dan Jürgen Habermas yang digunakan untuk menjelaskan fondasi ontologis, epistemologis, aksiologis, serta normatif ilmu komunikasi. Sumber sekunder berasal dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan publikasi akademik lain yang relevan, baik terindeks secara nasional maupun internasional. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, kebaruan publikasi, dan kemampuannya menjelaskan perkembangan pemikiran komunikasi dalam konteks digital. Penulis mengutamakan publikasi dalam rentang lima sampai sepuluh tahun terakhir, tanpa menghilangkan karya klasik yang memiliki fungsi teoritis mendasar. Penggabungan sumber klasik dan kontemporer penting karena penelitian ini tidak hanya memetakan kondisi mutakhir, tetapi juga menelusuri transformasi pemikiran dari model komunikasi linear menuju konstruksi makna, pluralitas paradigma, kritik terhadap kekuasaan, dan persoalan etika digital. Dengan komposisi tersebut, data penelitian dapat memperlihatkan kesinambungan sekaligus perubahan konsep filosofis ilmu komunikasi dari waktu ke waktu (Cresswell & Poth, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi yang berlangsung dalam beberapa tahap. Pertama, peneliti menetapkan fokus pencarian berdasarkan empat tema inti, yaitu ontologi komunikasi, epistemologi komunikasi, aksiologi komunikasi, dan etika komunikasi. Kedua, literatur ditelusuri melalui berbagai basis data akademik menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan keempat tema tersebut serta komunikasi digital. Ketiga, dokumen yang ditemukan diidentifikasi dan diseleksi berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, serta kebaruan publikasi, dengan prioritas pada literatur lima sampai sepuluh tahun terakhir dan tetap mempertahankan karya klasik yang menjadi fondasi teori. Keempat, sumber terpilih diklasifikasikan menurut tema filosofis dan konteks pembahasannya, kemudian diorganisasikan agar memudahkan perbandingan antara perspektif ontologis, epistemologis, aksiologis, dan etis. Kelima, teks dibaca secara mendalam untuk menandai argumentasi, konsep, persamaan, perbedaan, dan celah penelitian yang relevan dengan tujuan kajian. Proses ini mengikuti prinsip studi kepustakaan yang menempatkan dokumentasi dan seleksi literatur sebagai proses sistematis, bukan sekadar pengumpulan kutipan (Zed, 2014). Untuk meningkatkan keterlacakan metodologis, versi final artikel perlu melaporkan nama basis data, tanggal pencarian, *search string*, serta jumlah dokumen yang diseleksi.

Analisis data dilakukan secara iteratif melalui model Miles (2015) yang meliputi kondensasi atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.



Pada tahap pertama, informasi dari literatur diseleksi dan difokuskan pada unit-unit yang berkaitan dengan hakikat komunikasi, dasar pengetahuan, orientasi nilai, etika, teknologi digital, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial. Tahap kedua dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam empat kategori utama yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika kemudian menyajikannya dalam narasi analitis dan kerangka konseptual agar hubungan antarkategori dapat dibandingkan. Tahap ketiga adalah sintesis interpretatif untuk menemukan pola, kesinambungan, kontradiksi, perubahan paradigma, serta *research gap* di antara berbagai sumber. Proses tersebut berlangsung secara bolak-balik hingga terbentuk pemaknaan yang koheren. Keabsahan interpretasi diperkuat melalui perbandingan sumber dan perspektif teori dari periode yang berbeda, sebagaimana yang telah dirancang. Prinsip analisis isi juga digunakan sebagai landasan interpretatif karena teks dipahami dalam konteks produksi dan penggunaan maknanya (Krippendorff, 2018). Dengan demikian, hasil akhir analisis bukan sekadar ringkasan literatur, tetapi sintesis filosofis yang menjelaskan keterkaitan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika dalam komunikasi digital.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Transformasi Ontologis: Dari Transmisi Pesan menuju Konstruksi Realitas Digital

Hasil pertama menunjukkan terjadinya *change/transformation* pada hakikat atau ontologi komunikasi. Sintesis literatur memperlihatkan perubahan dari paradigma klasik yang melihat komunikasi sebagai proses linear pengiriman pesan menuju pemahaman komunikasi sebagai konstruksi makna yang relasional, dinamis, dan multidimensional. Model transmisi menempatkan komunikator, pesan, saluran, penerima, dan efek sebagai elemen utama, sedangkan perkembangan teori komunikasi selanjutnya memperlihatkan bahwa penerima tidak bersifat pasif, melainkan aktif menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, kebudayaan, identitas, dan konteks sosial (Littlejohn & Foss, 2021). Dalam lingkungan digital, perubahan tersebut semakin kompleks karena realitas komunikasi dibentuk melalui interaksi manusia dengan platform, jaringan, algoritma, representasi media, dan relasi kekuasaan (Moreno Esparza, 2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa realitas digital bahkan membentuk ruang hibrid yang menghubungkan realitas fisik dan virtual serta memungkinkan makna diproduksi dan direproduksi secara terus-menerus. Hallinan, Scharlach, dan Shifman menunjukkan bahwa platform bukan sekadar medium netral karena nilai dapat diekspresikan dan diperebutkan mulai dari pengguna hingga tingkat infrastruktur platform.



Perubahan Ontologis	Paradigma Lama	Paradigma Digital
Hakikat komunikasi	Transmisi pesan	Konstruksi makna
Realitas	Relatif objektif	Plural dan terkonstruksi
Aktor	Pengirim dan penerima	Manusia, platform dan algoritma
Struktur	Linear	Jaringan dan multidimensional

Secara lebih sederhana, data literatur tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan ontologis “apa itu komunikasi?” tidak lagi dapat dijawab hanya dengan menyebut proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi kontemporer harus dipahami sebagai proses yang sekaligus menciptakan realitas, mengorganisasikan pengalaman, membentuk identitas, serta memengaruhi apa yang dianggap benar dan penting. Dalam media digital, individu tidak hanya menerima informasi, tetapi memproduksi, memodifikasi, mengomentari, dan mendistribusikannya kembali melalui jaringan yang terhubung. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma dan struktur platform juga menjadi bagian dari pembentukan realitas karena menentukan keterlihatan dan peredaran informasi. Temuan ini memperluas konsep *mediated construction of reality* dari Sunstein (2018), yakni realitas sosial semakin tidak dapat dipisahkan dari proses mediasi. Hallinan et al (2022) juga memperlihatkan bahwa komunikasi nilai pada media sosial berlangsung di berbagai Tingkat dari pengguna individual sampai infrastruktur global sehingga teknologi tidak dapat diperlakukan sebagai latar yang sepenuhnya pasif. Dengan demikian, ontologi komunikasi digital dapat direstatemen sebagai realitas komunikatif yang dihasilkan melalui hubungan manusia, makna, teknologi, institusi, dan kekuasaan.

Empat kecenderungan ditemukan dari transformasi ontologis tersebut. Pertama, terjadi pergeseran dari transmission menuju construction, karena komunikasi semakin dipahami sebagai praktik pembentukan makna. Kedua, muncul pergeseran dari human-centered menuju *socio-technical communication*, karena teknologi, platform, dan algoritma ikut menentukan struktur komunikasi. Ketiga, terjadi pergeseran dari *singular reality* menuju *plural-mediated realities*, ketika satu peristiwa dapat dikonstruksi dalam representasi yang berbeda oleh aktor, media, dan komunitas digital. Keempat, muncul *power-embedded communication*, karena konstruksi realitas tidak berlangsung dalam ruang netral, tetapi dipengaruhi kepentingan ekonomi, politik, ideologi, dan struktur platform (Fuchs, 2021). Penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa proses seleksi, *framing*, representasi, dan jaringan informasi dapat mempertahankan atau mengubah struktur sosial. Konseptualisasi *platform values* dari Hallinan et al (2022) memperkuat pola tersebut dengan menunjukkan



bahwa nilai bukan hanya berada dalam pesan pengguna, tetapi juga dapat melekat pada kebijakan dan infrastruktur platform. Kesimpulan data pertama adalah bahwa ontologi ilmu komunikasi harus diperluas dari *communication between persons* menuju *communication within socio-technical realities*.

Krisis dan Pluralitas Epistemologi Komunikasi Digital

Hasil kedua memperlihatkan dua fenomena yang berjalan bersamaan, yaitu trend pluralitas epistemologis dan emergency krisis validitas pengetahuan dalam komunikasi digital. Sintesis literatur menunjukkan bahwa ilmu komunikasi tidak dibangun oleh satu paradigma tunggal. Pendekatan positivistik menekankan pengamatan, pengukuran, pengujian, dan hubungan sebab-akibat, pendekatan interpretatif menempatkan makna subjektif dan konteks sosial sebagai pusat analisis, sedangkan pendekatan kritis mempersoalkan kekuasaan, ideologi, ketidaksetaraan, dan dominasi dalam produksi pengetahuan (Littlejohn & Foss, 2021). Namun, transformasi digital menambahkan persoalan baru yaitu informasi tersedia secara berlimpah tetapi kebenarannya tidak selalu mudah diverifikasi. *Post-truth*, hoaks, disinformasi, dan otoritas pengetahuan yang terfragmentasi membuat persoalan epistemologi tidak lagi hanya berkaitan dengan metode penelitian, tetapi juga dengan siapa yang menghasilkan pengetahuan, bagaimana informasi diseleksi, dan mengapa suatu klaim dipercaya. Serafini (2023) menunjukkan bahwa algoritma, jaringan homofil, dan *filter bubbles* dapat membentuk fragmentasi audiens serta struktur pengetahuan dalam jurnalisme digital.

Dimensi Epistemologi	Fokus
Positivistik	Pengukuran dan bukti empiris
Interpretatif	Makna dan konteks
Kritis	Kekuasaan dan ideologi
Epistemologi digital	Verifikasi, algoritma, otoritas, disinformasi

Temuan tersebut berarti bahwa persoalan epistemologi komunikasi pada era digital tidak dapat disederhanakan menjadi pilihan antara penelitian kuantitatif, kualitatif, atau kritis. Masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana menentukan bahwa suatu informasi layak dipercaya dalam lingkungan komunikasi yang terfragmentasi dan dipengaruhi sistem rekomendasi algoritmik. Penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pengetahuan yang sebelumnya banyak berada pada akademisi, jurnalis, atau institusi formal kini berbagi ruang dengan pengguna media sosial yang dapat memproduksi dan mendistribusikan informasi secara luas. Demokratisasi produksi informasi mempunyai fungsi positif karena



memperluas partisipasi, tetapi juga menciptakan persoalan mengenai validitas, verifikasi, dan kompetensi epistemik. Serafini (2023) memperlihatkan bahwa lingkungan digital tidak otomatis menghasilkan pluralisme epistemik yang sehat; algoritma dan jaringan homogen justru dapat menghasilkan polarisasi dan pembentukan narasi dominan baru. Vraga et al (2021) juga menegaskan pentingnya membedakan pengetahuan literasi berita dengan perilaku konkret seperti verifikasi dan identifikasi misinformasi. Dengan demikian, epistemologi digital memerlukan *critical verification literacy*, yaitu kemampuan memeriksa sumber, bukti, konteks, kepentingan, dan mekanisme teknologi yang membentuk keterlihatan informasi.

Terdapat empat pola epistemologis yang muncul. Pertama, *multiparadigmatic knowledge*, yaitu tidak adanya satu pendekatan yang cukup untuk menjelaskan seluruh fenomena komunikasi yaitu positivisme kuat dalam pengujian empiris, interpretivisme dalam memahami makna, dan pendekatan kritis dalam membongkar struktur kekuasaan (Rahmadani et al., 2021). Kedua, muncul *epistemic decentralization*, yakni otoritas produksi pengetahuan bergeser dari institusi formal menuju jaringan pengguna yang lebih tersebar. Ketiga, terjadi *algorithmic mediation of knowledge*, karena apa yang diketahui publik semakin dipengaruhi oleh sistem rekomendasi, seleksi, personalisasi, dan distribusi platform. Keempat, berkembang *verification imperative*, yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap literasi, pemeriksaan fakta, refleksi kritis, dan transparansi sumber. Penulis sendiri menegaskan bahwa pengetahuan komunikasi pada era digital perlu bersifat kritis, reflektif, dan integratif. Kajian Serafini memperkuat pentingnya mempertimbangkan algoritma dan *filter bubbles* sebagai kondisi epistemik komunikasi digital, sedangkan Vraga et al (2021) menempatkan verifikasi dan kemampuan mengenali misinformasi sebagai bagian penting perilaku literasi berita. Kesimpulan hasil kedua adalah bahwa kebenaran komunikasi digital membutuhkan bukan hanya akses informasi, tetapi mekanisme epistemik untuk menguji informasi tersebut.

Krisis Nilai dan Integrasi Aksiologi dan Etika sebagai Solusi

Hasil ketiga menunjukkan adanya *controversy* dan *emergency* pada dimensi aksiologi serta etika komunikasi, sekaligus menawarkan integrasi nilai sebagai solusi. Secara normatif, literatur menempatkan kebenaran, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kebermanfaatan sosial, penghormatan terhadap manusia, dan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai nilai fundamental komunikasi (Boyne & Habermas, 1986). Namun, sintesis penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dan praktik komunikasi digital. Logika popularitas, kepentingan ekonomi, propaganda politik, *personal branding*, sensasionalisme, dan algoritma berbasis interaksi dapat mendorong konten yang menarik perhatian tanpa menjamin kebenaran atau kemanfaatannya. Pada sisi etis, disinformasi,



ujaran kebencian, manipulasi informasi, pelanggaran privasi, dan anonimitas memperlihatkan konsekuensi ketika kebebasan komunikasi tidak disertai akuntabilitas. UNESCO (2023) menempatkan transparansi, akuntabilitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, akses informasi, dan tanggung jawab platform sebagai prinsip penting tata kelola digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa problem aksiologi dan etika bukan sekadar perilaku buruk individu, tetapi terkait pula dengan desain sistem dan struktur komunikasi digital.

Nilai Ideal	Tekanan Digital	Orientasi Solusi
Kebenaran	Disinformasi	Verifikasi
Keadilan	Bias/ketimpangan	Fairness
Tanggung jawab	Anonimitas	Akuntabilitas
Kemanfaatan	Sensasionalisme	Kepentingan publik
Kebebasan	Hate speech	Kebebasan bertanggung jawab

Jika disederhanakan, temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif tidak selalu berarti komunikasi yang baik secara aksiologis dan etis. Sebuah pesan dapat memperoleh perhatian besar, tersebar sangat cepat, dan menghasilkan efek kuat, tetapi tetap bermasalah apabila tidak benar, manipulatif, diskriminatif, atau merugikan kepentingan publik. Karena itu, ukuran keberhasilan komunikasi digital tidak dapat berhenti pada jumlah klik, *engagement*, viralitas, jangkauan, atau kemampuan memengaruhi audiens. Penelitian ini memperlihatkan bahwa aksiologi menuntut pertanyaan lebih mendasar: *untuk tujuan apa komunikasi dilakukan, kepentingan siapa yang dilayani, serta akibat sosial apa yang dihasilkan?* Etika kemudian menerjemahkan pertanyaan nilai tersebut ke dalam tuntutan konkret berupa kejujuran, transparansi, penghormatan, perlindungan privasi, dan tanggung jawab sosial. Hallinan et al. menunjukkan bahwa nilai pada platform dapat muncul secara eksplisit maupun implisit dalam praktik pengguna dan infrastruktur. Sementara itu, UNESCO (2023) menegaskan bahwa respons terhadap disinformasi dan ujaran kebencian perlu menjaga kebebasan berekspresi sekaligus menerapkan tata kelola yang berbasis hak dan akuntabilitas. Dengan demikian, aksiologi menentukan arah komunikasi, sedangkan etika menentukan batas tindakan komunikatif.

Empat kecenderungan dapat ditarik dari hasil ketiga. Pertama, terdapat *value displacement*, yaitu pergeseran orientasi dari kebenaran dan kemanfaatan menuju perhatian, keuntungan, popularitas, atau kepentingan kekuasaan. Kedua, muncul *ethical amplification*, yaitu teknologi dapat memperbesar konsekuensi moral suatu pesan karena informasi dapat



direplikasi dan menyebar dengan sangat cepat. Ketiga, terdapat *distributed responsibility*, sebab tanggung jawab komunikasi tidak lagi hanya berada pada komunikator individual tetapi juga platform, institusi, pemerintah, media, akademisi, dan pengguna. UNESCO (2023) secara eksplisit menempatkan tata kelola digital sebagai tanggung jawab multistakeholder dengan peran bagi negara, platform, masyarakat sipil, media, academia, dan komunitas teknis. Keempat, muncul *integrative ethical solution*, yaitu pendidikan etika, literasi digital, regulasi, desain platform yang bertanggung jawab, dan kesadaran individu perlu berjalan secara bersamaan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pendidikan, regulasi, dan peningkatan kesadaran merupakan unsur penting penguatan etika komunikasi. Kesimpulan hasil ketiga adalah bahwa komunikasi digital yang bertanggung jawab membutuhkan integrasi nilai, etika, kompetensi pengguna, dan tata kelola teknologi, bukan sekadar kepatuhan individual.

Discussion

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan filosofis utama mengenai transformasi ilmu komunikasi pada era digital. Pertama, pada dimensi ontologis terjadi pergeseran dari komunikasi sebagai transmisi linear menuju komunikasi sebagai konstruksi realitas yang dibentuk oleh manusia, simbol, jaringan, platform, algoritma, dan struktur kekuasaan. Kedua, dimensi epistemologis memperlihatkan bahwa sifat multiparadigma ilmu komunikasi semakin kompleks karena lingkungan digital memunculkan persoalan baru mengenai otoritas pengetahuan, verifikasi informasi, algoritma, *post-truth*, dan disinformasi. Ketiga, dimensi aksiologis dan etis menunjukkan ketegangan antara nilai ideal komunikasi yaitu kebenaran, keadilan, kebermanfaatan dan tanggung jawab dengan logika digital yang dapat mengutamakan perhatian, popularitas, kepentingan ekonomi, dan manipulasi. Temuan-temuan tersebut konsisten dengan simpulan awal penelitian ini bahwa ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika merupakan dimensi yang kompleks sekaligus saling berkaitan. Yang diperjelas melalui penelitian ini adalah hubungan antardimensi, perubahan realitas komunikasi menimbulkan problem pengetahuan, problem pengetahuan memengaruhi orientasi nilai, dan orientasi nilai menentukan kebutuhan terhadap etika. Hubungan ini menjadi dasar bagi kerangka filosofis komunikasi digital yang integratif (Hadi, 2021).

Hubungan antardimensi tersebut muncul karena setiap tindakan komunikasi selalu mengandung asumsi mengenai realitas, kebenaran, nilai, dan tindakan yang benar. Ontologi menjawab realitas komunikasi seperti apa yang sedang dihadapi, epistemologi menjawab bagaimana pengetahuan tentang realitas tersebut diperoleh dan diuji, aksiologi menentukan tujuan serta nilai yang hendak diwujudkan sedangkan etika menentukan tindakan yang diperbolehkan atau harus dihindari. Dalam komunikasi digital, hubungan



ini semakin erat karena teknologi tidak hanya mengantarkan pesan tetapi turut mengorganisasikan visibilitas, interaksi, dan distribusi informasi. Hallinan et al (2022) menunjukkan bahwa nilai dapat beroperasi mulai dari praktik pengguna hingga infrastruktur platform. Serafini (2023) menunjukkan bahwa algoritma dan *filter bubbles* juga berkaitan dengan bagaimana struktur pengetahuan dan narasi digital terbentuk. Artinya, sistem yang membentuk realitas komunikasi sekaligus dapat memengaruhi apa yang diketahui dan dinilai masyarakat. Karena itu, krisis disinformasi tidak cukup diselesaikan melalui verifikasi fakta saja; diperlukan pemahaman terhadap struktur teknologi, orientasi kepentingan, nilai publik, dan tanggung jawab moral. Integrasi filosofis menjadi perlu karena setiap kegagalan pada satu dimensi dapat menghasilkan konsekuensi pada dimensi lainnya.

Temuan penelitian ini memiliki kontinuitas dengan kajian terdahulu sekaligus memperluasnya. Moreno Esparza (2015) menjelaskan komunikasi dan media sebagai bagian dari konstruksi realitas sosial, Fuchs (2021) menekankan relasi antara komunikasi digital, kapitalisme, kekuasaan, dan kritik social sedangkan Bennett & Livingston (2018) memusatkan perhatian pada *disinformation order* dan gangguan terhadap komunikasi publik. Referensi tersebut telah menjadi bagian penting dari fondasi penelitian. Literatur baru memperdalam fragmen-fragmen tertentu. Hallinan et al (2022) mengembangkan konsep *platform values*, Serafini (2023) menghubungkan algoritma dengan kondisi epistemologi digital, dan Vraga et al (2021) menekankan teorisasi literasi serta perilaku verifikasi informasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada upayanya tidak menjadikan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika sebagai empat tema paralel, tetapi sebagai rantai filosofis yang saling menentukan. Kebaruan konseptual dapat dirumuskan sebagai *Ontology, Epistemology, Axiology and Ethics Integration Framework*, yang menjelaskan bahwa konstruksi realitas memengaruhi produksi kebenaran, produksi kebenaran berhubungan dengan orientasi nilai, dan nilai memperoleh bentuk praktis melalui etika komunikasi. Novelty ini lebih defensibel daripada sekadar menyatakan bahwa filsafat komunikasi digital masih jarang diteliti.

Secara historis, perubahan dari komunikasi massa yang relatif terpusat menuju komunikasi digital berjejaringan menandai redistribusi kemampuan memproduksi dan menyebarkan informasi. Individu memperoleh ruang lebih luas untuk menjadi produsen pesan, tetapi pada saat yang sama platform memperoleh kekuasaan struktural melalui desain, algoritma, moderasi konten, dan distribusi keterlihatan. Secara sosial, kondisi tersebut menghasilkan paradoks yaitu demokratisasi komunikasi meningkatkan partisipasi, tetapi dapat sekaligus memperbesar fragmentasi pengetahuan, polarisasi, dan ketidakpastian kebenaran. Penelitian ini menunjukkan paradoks tersebut melalui pembahasan realitas digital, *post-truth*, algoritma, propaganda, dan krisis etika. Secara



ideologis, temuan menolak asumsi bahwa teknologi merupakan perangkat yang sepenuhnya netral. Konsep *platform values* menunjukkan bahwa nilai dapat beroperasi melalui kebijakan, praktik, dan infrastruktur platform. Karena itu, filsafat komunikasi digital tidak cukup hanya menilai perilaku pengguna karena ia juga perlu mengkritisi arsitektur kekuasaan yang menentukan siapa terlihat, informasi apa diperkuat, nilai apa diprioritaskan, dan kepentingan siapa yang memperoleh keuntungan. Makna terdalam hasil ini adalah perlunya mengembalikan pertanyaan filosofis ke pusat studi komunikasi digital.

Secara reflektif, integrasi empat dimensi filosofis memiliki fungsi penting bagi pengembangan ilmu komunikasi. Ontologi mencegah peneliti mereduksi komunikasi menjadi proses teknis; epistemologi menjaga ketelitian dalam menentukan pengetahuan dan bukti; aksiologi mengarahkan ilmu kepada manfaat sosial; sedangkan etika memberi batas normatif bagi penerapan pengetahuan. Dalam konteks digital, integrasi ini dapat memperkuat kemampuan masyarakat dan institusi untuk menilai informasi secara kritis, memahami kekuasaan platform, serta mempertanggungjawabkan konsekuensi komunikasi. Namun, terdapat pula potensi disfungsi. Pendekatan normatif yang terlalu kaku dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi; klaim epistemik dapat berubah menjadi monopoli kebenaran; regulasi dapat berkembang menjadi kontrol berlebihan; dan kritik terhadap algoritma dapat mengabaikan agensi pengguna. Karena itu, keseimbangan diperlukan antara kebebasan, kebenaran, pluralitas, dan tanggung jawab. UNESCO (2023) menegaskan bahwa penanganan disinformasi serta ujaran kebencian perlu tetap melindungi kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi melalui tata kelola yang berbasis hak serta melibatkan banyak pemangku kepentingan. Refleksi ini menegaskan bahwa etika komunikasi yang baik bukan etika pembatasan, melainkan etika kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi penelitian menuntut penerjemahan kerangka filosofis ke dalam pendidikan, penelitian, tata kelola media, dan kebijakan komunikasi digital. Pertama, kurikulum ilmu komunikasi perlu mengintegrasikan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika ke dalam mata kuliah digital, bukan menempatkan filsafat ilmu hanya sebagai materi teoritis terpisah. Kedua, pelatihan literasi digital perlu mencakup verifikasi sumber, kesadaran algoritmik, evaluasi bias, etika penggunaan data, privasi, dan kemampuan memahami kepentingan di balik informasi. Temuan Vraga et al (2021) menunjukkan bahwa literasi berita perlu dibedakan dari perilaku konkret seperti verifikasi serta identifikasi misinformasi. Ketiga, lembaga media dan platform perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, penilaian risiko, dan mekanisme koreksi. UNESCO (2023) secara eksplisit menempatkan transparansi platform, akses informasi bagi pengguna, akuntabilitas, *human-rights due diligence*, dan tata kelola multistakeholder sebagai prinsip penting. Keempat,



penelitian komunikasi harus semakin reflektif terhadap bagaimana metode dan teknologi penelitian membawa asumsi nilai tertentu. Dengan langkah tersebut, kerangka *Ontology*, *Epistemology*, *Axiology* dan *Ethics* dapat berfungsi bukan hanya sebagai perangkat filosofis, tetapi sebagai dasar *Responsible Digital Communication*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan kesimpulan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika tidak dapat diperlakukan sebagai empat dimensi filosofis yang berdiri sendiri dalam memahami ilmu komunikasi di era digital. Keempatnya membentuk satu rangkaian konseptual yang saling menentukan: ontologi menjelaskan hakikat realitas komunikasi, epistemologi menentukan bagaimana kebenaran komunikasi diperoleh dan divalidasi, aksiologi mengarahkan tujuan serta nilai yang hendak diwujudkan, sedangkan etika memberi batas moral bagi praktik komunikasi. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa komunikasi digital telah bergerak dari model transmisi linear menuju konstruksi realitas yang plural, multidimensional, dan dipengaruhi oleh manusia, teknologi, algoritma, media, serta relasi kekuasaan. Pada saat yang sama, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, pelanggaran privasi, serta dominasi kepentingan ekonomi dan politik memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis menghasilkan komunikasi yang lebih baik. Hikmah utama penelitian ini adalah bahwa perkembangan ilmu komunikasi harus selalu menghubungkan apa yang dianggap realitas, bagaimana kebenaran ditentukan, untuk tujuan apa komunikasi digunakan, dan bagaimana komunikasi seharusnya dilakukan secara bertanggung jawab.

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada upayanya membangun pembacaan integratif terhadap fondasi filosofis ilmu komunikasi yang dalam banyak kajian sebelumnya cenderung dipisahkan ke dalam pembahasan ontologi, epistemologi, aksiologi, atau etika secara parsial. Penelitian ini mengidentifikasi adanya *research gap* berupa masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan keempat dimensi tersebut dalam satu kerangka untuk memahami kompleksitas komunikasi kontemporer dan digital. Secara konseptual, penelitian memberikan sumbangan berupa *Ontology, Epistemology, Axiology and Ethics Integration Framework*, yaitu kerangka yang memandang realitas, kebenaran, nilai, dan tanggung jawab moral sebagai mata rantai yang membentuk komunikasi digital yang bertanggung jawab. Kontribusi pendekatan penelitian juga terletak pada sintesis literatur klasik dan kontemporer untuk memperlihatkan kesinambungan sekaligus perubahan paradigma dalam ilmu komunikasi. Kerangka ini membuka pertanyaan keilmuan baru mengenai bagaimana algoritma, kekuasaan platform, otoritas pengetahuan, nilai sosial, dan prinsip etis berinteraksi dalam membentuk praktik komunikasi. Dengan demikian,



kontribusi penelitian tidak hanya berupa rangkuman filsafat komunikasi, tetapi menawarkan arsitektur konseptual untuk pengembangan kajian *responsible digital communication*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan kontribusinya. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan bergantung pada cakupan, kualitas, serta interpretasi terhadap literatur yang dipilih. Karena itu, kerangka integratif yang dirumuskan belum diuji melalui data empiris mengenai pengalaman pengguna media, praktik jurnalisme, komunikasi politik, komunikasi organisasi, maupun perilaku komunikasi di platform digital. Kedua, meskipun peneliti menyebut penggunaan *systematic literature review* secara konseptual, prosedur pencarian belum dilaporkan secara lengkap dalam bentuk jumlah dokumen awal, proses eliminasi, kriteria inklusi-eksklusi, dan alur seleksi sumber. Ketiga, perkembangan komunikasi digital yang sangat cepat berarti persoalan baru seperti kecerdasan buatan generatif, *deepfakes*, komunikasi manusia-mesin, moderasi algoritmik, dan etika data masih membutuhkan kajian tersendiri. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka *Ontology, Epistemology, Axiology and Ethics* melalui studi empiris, penelitian komparatif, analisis platform, eksperimen, atau metode campuran untuk menilai bagaimana masing-masing dimensi berinteraksi dalam konteks komunikasi digital yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adisti Istivari Wahyudi. (2024). Tinjauan Cabang Filsafat (Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi) dalam Buku Bahasa Indonesia Kelas IV SDN Patengteng 1. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(1), 34–45. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.625>
2. Alamin, M., & Sopian, A. (2024). Landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu sosial. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4), 89–102. <https://doi.org/10.54437/jssa.v2i2.487>
3. Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
4. Boyne, R., & Habermas, J. (1986). The Theory of Communicative Action, Vol. 1, Reason and the Rationalization of Society. In *The British Journal of Sociology* (Vol. 37, Issue 4). Polity Press. <https://doi.org/10.2307/590724>
5. Fuchs, C. (2021). *Social Media: A Critical Introduction* (3rd ed.). Sage Publications.
6. Hadi, S. (2021). Epistemologi Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Filsafat Ilmu. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 123–138. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.35302>
7. Hallinan, B., Scharlach, R., & Shifman, L. (2022a). Beyond Neutrality: Conceptualizing



- Platform Values. *Communication Theory*, 32(2), 201-222.
<https://doi.org/10.1093/ct/qtab008>
8. Hallinan, B., Scharlach, R., & Shifman, L. (2022b). Beyond Neutrality: Conceptualizing Platform Values. *Communication Theory*, 32(2), 201-222.
<https://doi.org/10.1093/ct/qtab008>
9. Hallinan, B., Scharlach, R., & Shifman, L. (2022c). Beyond Neutrality: Conceptualizing Platform Values. *Communication Theory*, 32(2), 201-222.
<https://doi.org/10.1093/ct/qtab008>
10. Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781071878781>
11. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2021). *Theories of Human Communication* (12th ed.). Waveland Press.
<http://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3Fk0aRpJM4C&pgis=1>
12. McQuail. (2005). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
13. Miles, H. & S. (2015). Qualitative Data A Methods Sourcebook. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (4th ed., Vol. 16, Issue 2). SAGE Publications.
14. Moreno Esparza, G. A. (2015). Communication Power. In *Comunicación y Sociedad* (Issue 15). Oxford University Press. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i15.1148>
15. Nyre, L. (2018). The mediated construction of reality. In *New Media & Society* (Vol. 20, Issue 2). Polity Press. <https://doi.org/10.1177/1461444817742900>
16. Rahmadani, E., Armanto, D., Syafitri, E., & Umami, R. (2021). Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dalam Pendidikan Karakter. *Journal of Science and Social Research*, 4(3), 307.
<https://doi.org/10.54314/jssr.v4i3.680>
17. Serafini, L. (2023a). The old-new epistemology of digital journalism: how algorithms and filter bubbles are (re)creating modern metanarratives. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01905-6>
18. Serafini, L. (2023b). The old-new epistemology of digital journalism: how algorithms and filter bubbles are (re)creating modern metanarratives. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 395. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01905-6>
19. Serafini, L. (2023c). The old-new epistemology of digital journalism: how algorithms and filter bubbles are (re)creating modern metanarratives. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 395. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01905-6>
20. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>



21. Sunstein, C. R. (2018). #republic: DIVIDED DEMOCRACY IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA. In *#republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1111/jcom.12344>
22. UNESCO. (2023a). Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information. In *Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information*. UNESCO.
23. UNESCO. (2023b). Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information. In *Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information*. UNESCO Publishing.
24. Unwakoly, S. (2022). Berpikir Kritis Dalam Filsafat Ilmu: Kajian Dalam Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 95–102. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42561>
25. Vraga, E. K., Tully, M., Maksl, A., Craft, S., & Ashley, S. (2021a). Theorizing News Literacy Behaviors. *Communication Theory*, 31(1), 1–21. <https://doi.org/10.1093/ct/qtaa005>
26. Vraga, E. K., Tully, M., Maksl, A., Craft, S., & Ashley, S. (2021b). Theorizing News Literacy Behaviors. *Communication Theory*, 31(1), 1–21. <https://doi.org/10.1093/ct/qtaa005>
27. W. Cresswell, J., & N. Poth, C. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
28. Zed. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 0, Issue 52). Yayasan Obor Indonesia. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
29. (2024). Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach (nep). In *Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach (nep)*. <https://doi.org/10.58338/nout7356>

